

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam wujud Pancasila merupakan nilai-nilai yang telah lama melekat pada diri manusia Indonesia, ditinjau dari kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, cara berpikir, juga agama (Kaelan, 2010). Dengan kata lain bahan utama pembentuk Pancasila bukan berasal dari luar negeri melainkan bangsa Indonesia itu sendiri melalui unsur-unsur di atas. Yang selanjutnya dimodernisasikan oleh Ir. Soekarno, sebagai penggali dan pengutara Pancasila (Kaelan & Zubaedi, 2007) bersama tokoh lainnya secara tegas menggagas pertama kali di sidang perdana BPUPKI. Hingga bermuara pada terpanjangnya harapan dan cita-cita bangsa pada bingkai yang kita kenal dengan Pancasila.

Pancasila pantas sekali disebut sebagai bingkai kemajemukan Indonesia, sebab lahir atas konsensus nasional bangsa yang majemuk (Ubaedillah & Rozak, 2016). Bangsa yang majemuk adalah sebuah anugerah, sebab menjadi potensi dasar tercapainya keunggulan sehingga terlihat istimewa di mata dunia. Di sisi lain juga sangat berpotensi mengalami kehancuran atas dirinya sendiri. Dalam arti rentan sekali mengalami konflik internal, perang antar saudara, perang sesama bangsa Indonesia, yang dilatarbelakangi oleh rasa ingin mendominasi atas salah satu kelompok suku atau budaya.

Berangkat dari kemajemukan bangsa Indonesia, negara kita hadir tidak dari titik nol, melainkan membawa sejuta problematika yang kompleks, yang dapat kita saksikan sampai saat ini, keragaman etnik. Dengan banyaknya jenis kelompok etnik yang eksis itu masing-masing memiliki latar belakang kepercayaan, tujuan, hingga kepentingan yang berbeda, karenanya nilai-nilai etika yang berkembang atau dikembangkan bervariasi pula, hal ini berdampak pada konsep baik dan buruk dalam etika mempunyai ukuran ganda. Artinya baik dan buruk perilaku seseorang dinilai sesuai dengan keyakinan dan kebiasaan yang

melingkunginya. Jika ini berlanjut nilai yang membudaya pada bangsa menjadi liar, dan tercipta degradasi moral. Secara tidak langsung menunjukkan tidak adanya nilai satu kesatuan pada diri bangsa ini, karena mementingkan kemajuan etnik sendiri. Keragaman pada kemajemukan suatu bangsa dapat menjadi keunggulan apabila dikelola dengan benar sehingga menjadi simphoni yang menghasilkan bunyi dan nada yang serasi (Solissa, 2021).

Eksistensi Pancasila di negara ini adalah sebagai titik pijak yang menjadi komitmen, juga menjadi titik temu dan titik berangkat dari tiap kelompok etnik untuk hidup secara berdampingan dengan aturan, asas, dan tujuan yang sama. Pancasila merupakan janji luhur yang lahir atas musyawarah para pendiri bangsa yang tercantum di dalamnya dasar-dasar moral dan karakter yang semestinya dimiliki bangsa (Sacipto, 2022)

Pancasila kita posisikan sebagai kaca mata etis pengamat perilaku anak bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain harus meyakini bahwa Pancasila adalah falsafah dan pandangan hidup bangsa, Pancasila juga harus dimanfaatkan sebagai perspektif bagi kehidupan berbangsa, baik ke luar maupun ke dalam (Solissa, 2021). Ke luar artinya mampu menjadi garda terdepan menghadapi tantangan, sekaligus menjadi penyaring ideologi-ideologi ekstrim dari luar, seperti liberalisme, hedonisme, komunisme, kapitalisme dan lainnya, yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa. Ke dalam artinya Pancasila menjadi pijakan, tujuan, juga standar nilai bagi perilaku anak bangsa.

Salah satu praktik yang menyalahi konsep etika bangsa sekaligus melakukan yang bukan wewenangnyanya sehingga merugikan negara dan berkhianat pada nilai-nilai luhur Pancasila adalah korupsi. Korupsi merupakan masalah sosial yang kerap dilakukan oleh para pejabat (Maukoni & Saingo, 2023), yang melibatkan segelintir orang penting lainnya untuk memenuhi hasrat ketamakan diri sendiri juga orang-orang terdekat.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, “*corruptio*” yang memiliki arti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling (Zanis & dkk, 2022). Anas Salahudin (2013) menambahkan korupsi berarti perbuatan bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak memiliki moral, penyimpangan dari kesucian. Hal ini menunjukkan korupsi merupakan suatu perilaku tercela yang marak terjadi di kalangan pejabat negara, tak menutup orang-orang biasa, yang memanfaatkan kekuatan kedudukan untuk kepentingan diri di atas kepentingan bersama, tak peduli busuk atau hina selagi tak ada yang mengetahui.

Fenomena korupsi sudah bukan lagi hal yang asing di telinga masyarakat kita, sebab acapkali, bahkan boleh disebut setiap tahun setidaknya ada satu atau dua kasus korupsi yang menjadi topik hangat pembicaraan media berita. Sejarah pun turut menjadi saksi praktik korupsi yang sudah ada sejak masa kerajaan Nusantara, diperparah pada masa VOC dan pemerintahan Hindia Belanda dengan mengakarnya dan tersistematisasinya korupsi pada keberlanjutan pembangunan (Solissa, 2021). Berlanjut hingga pasca kolonial, yang menunjukkan mental masyarakat saat itu khususnya para pemegang kekuasaan yang akrab sekali dengan korupsi, seolah melegalkannya, menganggapnya sebagai praktik yang lumrah bahkan harus selalu ditautkan untuk mempermudah pekerjaan.

Ironis sekali negara ini, memiliki dasar negara Pancasila yang dibangun penuh kekhidmatan namun masih banyak korupsi terjadi (Azzahrah & dkk, 2022). Di mata masyarakat tindakan korupsi selalu menghasilkan citra negatif terhadap proses demokratisasi dan politisasi, alhasil rusaklah kepercayaan terhadap pejabat pemerintah. Namun perlu dipahami bahwa kebijakan politik itu mencerminkan tabiat manusia, segi-segi yang baik akan terlaksana dari naluri manusia yang baik, begitupun sebaliknya pada naluri manusia yang buruk (Budiardjo, 2009). Dalam konteks masalah korupsi, para elit politik secara kasat mata menampilkan sikap egoisme demi kepentingan-kepentingan di luar misi utamanya yang jelas sekali merugikan keuangan negara dan

kesejahteraan masyarakat, dana yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan nasional kepentingan publik termasuk memberdayakan sekolah justru disalahgunakan untuk kesenangan diri dan sanak saudara.

Anggapan terhadap faktor orang melakukan korupsi adalah kurangnya pendidikan yang ditempuh, kiranya tidak begitu tepat. Justru pada kenyataannya, tidak hanya di negara Indonesia, korupsi didalangi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi (Dwiputri & Anggraeni, 2021). Sehingga berhasil menempatkan kedudukan untuk berkuasa atas gelar pendidikan tingginya tersebut. Sayangnya kedudukan yang tinggi itu tidak dibarengi dengan moral yang tinggi pula, akibatnya pintar mengakali kelemahan rakyat saja.

Maraknya fenomena korupsi yang terjadi saat ini, menandakan aksi pemberantasan yang dilakukan masih belum efektif. Ketidakefektifan kinerja yang dilakukan KPK disebabkan oleh tugas yang besar dan tidak sepadan dengan sumber daya manusia yang dimiliki (Azzahrah & dkk, 2022). Selain itu, sistem hukum yang masih terbilang lemah sehingga mengakibatkan para koruptor merasa tidak jera atas perilaku kejinya. Hukum yang semestinya dibentuk untuk memastikan kehidupan yang teratur dan menjunjung nilai-nilai Pancasila, justru sebaliknya. Tidak berlebihan jika istilah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah memang benar adanya.

Tugas negara yang berdaulat semestinya memberdayakan potensi warganya (Ubaedillah & Rozak, 2016), pemerintah Indonesia melalui KPK tidak hanya fokus melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penggerebekan para koruptor, namun dibarengi dengan strategi preventif atau pencegahan. Strategi preventif dilakukan dengan mengajak keterlibatan masyarakat untuk memberantas korupsi melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi berdasarkan Pancasila di semua lini masyarakat, khususnya anak-anak bangsa mulai jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Pendidikan anti korupsi berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang diintegrasikan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dilakukan demi

terbentuknya anak-anak bangsa yang berintegritas sebagai generasi penerus. Sasaran pertama pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan sekaligus memberikan pemahaman kepada siswa terkait fenomena korupsi, yang mencakup kriteria, akibat dan penyebab, serta pemahaman tentang kewaspadaan terhadap sikap koruptif (Nur, 2021). Ini menunjukkan bahwa pengetahuan dasar mengenai fenomena korupsi dan sikap anti korupsi menjadi langkah awal untuk meminimalkan angka persentase kasus korupsi di Indonesia.

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik untuk Indeks Perilaku Anti korupsi (IPAK) Indonesia di tahun 2024 adalah sebesar 3,85 dari skala 0 sampai dengan 5. Nilai indeks yang mendekati 5 menunjukkan masyarakat semakin bersikap anti korupsi, dan sebaliknya nilai indeks yang mendekati 0 menunjukkan masyarakat semakin permisif terhadap tindakan korupsi. Angka yang diperoleh tahun ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 sebesar 3,92.

Terlaksananya program pendidikan anti korupsi ini diharapkan anak-anak bangsa, atau kita sebut saja peserta didik atau siswa dapat menjadi warga negara yang baik, memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidikan anti korupsi yang dilakukan sejak dini juga diharapkan mampu membentuk calon pemimpin yang berjiwa anti korupsi (Hakim & Pradityayudha, 2021).

Selain kurangnya pengetahuan dasar terkait antikorupsi, kemelut Indonesia hari-hari ini seperti perilaku keji korupsi diakibatkan karena ketiadaan karakter (Salahudin, dan Alkrienciehie, 2013). Karakter tidak sama seperti kecerdasan intelektual, karakter lebih dalam lagi, menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri (Ahmadin & dkk, 2023).

Karakter merupakan cara berpikir sekaligus cara bersikap seseorang sehingga menjadi ciri khas orang tersebut dalam berkehidupan (Salahudin, dan Alkrienciehie. 2013). Karenanya dalam pendidikan karakter selain memberikan pemahaman, penanamam kesadaran dan pembiasaan berbuat baik juga turut dilakukan. Ini sesuai dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di negara kita selama ini,

tidak hanya fokus membelajarkan siswa untuk memahami unsur negara dan hukumnya saja.

Kemerosotan karakter peserta didik hari-hari ini bisa terjadi karena buruknya teladan dari sosok orang dewasa baik guru, orangtua, atau masyarakat luas. Guru besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung, bapak doktor Mahmud menekankan bahwa pendidikan karakter bukanlah pendidikan yang berbasis hapalan dan pengetahuan verbalistis semata, melainkan dilakukan melalui *habitual action* dan keteladanan dari sosok pendidik, orangtua, dan masyarakat (Salahudin, dan Alkrienciehie, 2013). Terhapuslah sudah cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa ketika para perampok uang negara dibiarkan merusak karakter peserta didik kita dengan suguhan keteladanan yang buruk (Sacipto, 2022).

Komponen ideal yang digagas oleh KPK dan Kemendikbud untuk karakter anti korupsi bagi peserta didik meliputi, selalu berkata sesuai dengan fakta, tidak berbuat curang, berani menolak ajakan berbuat curang, berpenampilan sederhana, berperilaku konsisten terhadap aturan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan, serta selalu menuntaskan tugas tanpa mengandalkan kewenangan untuk menyuruh orang lain (Kemendikbud & KPK, 2012). Sayangnya pembiasaan yang dilakukan tak selalu berjalan mulus, seringkali kecolongan oleh kurangnya pemahaman tentang dampak dari kebiasaan buruk koruptif, hingga buruknya teladan yang disuguhkan dari orang-orang dewasa sekitar.

Perilaku koruptif sederhana yang kadang tidak kita sadari terjadi dan dapat kita saksikan hari-hari ini, khususnya pada peserta didik di sekolah, seperti menyontek, terlambat masuk sekolah, melanggar aturan sekolah, hingga menggelapkan uang orangtua (Wibawa, dkk., 2021). Perilaku koruptif sederhana tersebut juga terjadi di salah satu sekolah yang peneliti kunjungi, melalui wawancara terkait karakter anti korupsi pada dengan guru kelas 5, juga melalui angket karakter anti korupsi yang dibagikan kepada peserta didik, menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik ranah afektif khususnya yang berkaitan dengan anti korupsi

masih kurang memuaskan. Dilihat dari capaian rata-rata nilai angket karakter anti korupsi kelas 5A sebesar 49 dan kelas 5B sebesar 46, di mana keduanya masuk pada kategori sangat kurang.

Selain itu diperoleh juga data nilai asesmen penilaian akhir semester mata pelajaran Pendidikan Pancasila yang menunjukkan bahwa ketercapaian hasil belajar siswa ranah kognitif masih kurang memuaskan, lantaran masih kurang dari rata-rata Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) yaitu diperoleh rata-rata nilai sebesar 69,50 untuk kelas 5A dan 5B dengan keseluruhan 44 siswa. Ini menunjukkan bahwa kemampuan kognitif siswa pada pembelajaran Pendidikan Pancasila khususnya dalam memahami nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran dan kedisiplin masih perlu diperhatikan, dan apabila dibiarkan akan membentuk mental koruptif mereka sejak dini.

Jalan yang paling ampuh untuk mengubah mentalitas bangsa adalah melalui pendidikan dan ajaran agama (Sakinah & Bakhtiar, 2019). Di sekolah peserta didik ditanamkan nilai-nilai Pancasila secara utuh dan menyeluruh, menghindarkan benih-benih korupsi sejak dini. Penanaman nilai-nilai Pancasila pada siswa pendidikan dasar relatif lebih mudah karena mereka masih dalam kondisi optimal dan sangat potensial belajar dari meneladani gurunya (Dwiputri & Anggraeni, 2021). Bukti di lapangan jarang sekali ada materi khusus mengenai nilai-nilai anti korupsi baik di jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Sekolah biasanya membelajarkan peserta didik memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang tidak secara langsung berkaitan dengan aksi anti korupsi, seperti mengamalkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, kejujuran dan lainnya (Subkhan, 2020) yang diintegrasikan pada mata pelajaran agama, sosial, dan kewarganegaraan.

Fungsi utama pendidikan adalah untuk menciptakan dunia manusia yang tidak hanya unggul dalam kearifan intelektual, namun unggul dalam karakter juga (Risdiyany & Dewi, 2021). Pendidikan karakter anti korupsi yang tersistematisasi, berkurikulum, dan memiliki tujuan nyata barang tentu menginginkan pribadi peserta didik yang mempersonalisasikan

nilai-nilai terpuji termasuk nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakatnya. Jika seperti itu tidak hanya paham secara teori baik dan buruk saja tetapi timbul kesadaran untuk berperilaku sesuai pemahaman, inilah yang dinamakan karakter berintegritas, yang kemudian secara alami merasakan indahnya mencintai tanah air sendiri.

Transformasi mata pelajaran PPKn menjadi Pendidikan Pancasila sesungguhnya tidak mengubah fokus pembelajaran dari keduanya, tetap berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI (Parwati, dkk., 2023). Misi utamanya pun tetap sama, yaitu membantu peserta didik untuk tumbuh menjadi warga negara yang demokratis, baik dari sisi pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, maupun keterampilan kewarganegaraan (Rube'i, & Rohani, 2020). Ini menunjukkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kemelut Indonesia dari rendahnya pengetahuan peserta didik terhadap anti korupsi, sekaligus membentuk karakter peserta didik yang anti korupsi.

Model *Project Citizen* bisa menjadi pilihan tepat untuk membantu proses pembelajaran di kelas dalam membelajarkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik sebagai langkah preventif sedini mungkin terhadap perilaku korupsi. Model pembelajaran ini berbasis masalah, dengan begitu mendorong peserta didik untuk terlibat langsung dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan watak kewarganegaraan (Ahmadin & dkk, 2023). Pembelajaran model ini sudah mencakup 4 pilar pendidikan yakni *learning to know, learning to be, learning to do, and learning to live together*.

Pembelajaran dengan model *Project Citizen* melibatkan seluruh potensi dalam diri peserta didik aktif, potensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Karena pada pelaksanaannya peserta didik yang dibagi ke dalam beberapa kelompok secara aktif mencari tahu, berdiskusi, dan menunjukkan hasil diskusinya di depan teman kelasnya. Desain pembelajarannya pun berbasis portofolio, jadi proses memecahkan

masalahnya dituangkan dalam bentuk karya, sehingga menghasilkan ide pemikiran yang disuguhkan dengan tampilan menarik yang selanjutnya ditunjukkan di depan kelas (Ahmadin & dkk, 2023).

Adapun fokus perhatian model *Project Citizen* ini adalah pengembangan pengetahuan kewarganegaraan dan karakter kewarganegaraan (Ahmadin & dkk, 2023). Cocok diimplementasikan pada materi anti korupsi yang berkaitan dengan pengetahuan dan karakter kewarganegaraan, yang dalam pelaksanaannya juga melibatkan siswa untuk aktif merasakan pengalaman belajar yang empirik, mulai dari berdiskusi, bekerja kelompok, menemukan masalah, mengumpulkan informasi, membuat tampilan portofolio dan penayangan (Rube'i & Rohani, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berkenan untuk membahas lebih rinci mengenai pembelajaran Pendidikan Pancasila melalui penerapan model *Project Citizen* dalam membelajarkan peserta didik demi terwujudnya karakter anti korupsi yang sesungguhnya sehingga tidak mungkin perilaku keji serupa korupsi bersarang di sanubari, sebab peneliti percaya bahwa dengan dididik akan terbentuk pribadi bangsa yang berdedikasi. Maka dari itu judul penelitian yang diambil adalah **“Penerapan Model *Project Citizen* Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif dan Karakter Anti Korupsi Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Di Sekolah Dasar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan masalah dalam

penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hasil belajar kognitif siswa pada kelas yang menerapkan model *Project Citizen* dan kelas yang menerapkan model pembelajaran langsung sebelum diberikan perlakuan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila Fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII?

2. Bagaimana hasil belajar kognitif siswa pada kelas yang menerapkan model *Project Citizen* dan kelas yang menerapkan model pembelajaran langsung setelah diberikan perlakuan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila Fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII?
3. Apakah model *Project Citizen* lebih baik dari pada model pembelajaran langsung terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII?
4. Bagaimana peningkatan hasil belajar kognitif siswa dengan menerapkan model *Project Citizen* lebih baik dari pada dengan menerapkan model pembelajaran langsung pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII?
5. Bagaimana karakter anti korupsi siswa pada kelas yang menerapkan model *Project Citizen* dan kelas yang menerapkan model pembelajaran langsung sebelum diberikan perlakuan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila Fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII?
6. Bagaimana karakter anti korupsi siswa pada kelas yang menerapkan model *Project Citizen* dan kelas yang menerapkan model pembelajaran langsung setelah diberikan perlakuan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila Fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII?
7. Apakah model *Project Citizen* lebih baik dari pada model pembelajaran langsung terhadap karakter anti korupsi siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII?
8. Bagaimana peningkatan karakter anti korupsi siswa dengan menerapkan model *Project Citizen* lebih baik dari pada dengan menerapkan model pembelajaran langsung pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII?

9. Bagaimana hasil observasi guru dan siswa dalam penerapan model *Project Citizen* terhadap hasil belajar kognitif dan karakter anti korupsi siswa pada kelas eksperimen mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase C kelas 5 SDN Bekasi Jaya VII?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang disusun berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Mengetahui hasil belajar kognitif siswa pada kelas yang menerapkan model *Project Citizen* dan kelas yang menerapkan model pembelajaran langsung sebelum diberikan perlakuan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII.
2. Mengetahui hasil belajar kognitif siswa pada kelas yang menerapkan model *Project Citizen* dan kelas yang menerapkan model pembelajaran langsung setelah diberikan perlakuan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII.
3. Mengetahui apakah model *Project Citizen* lebih baik dari pada model pembelajaran langsung terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII.
4. Mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar kognitif siswa dengan menerapkan model *Project Citizen* lebih baik dari pada dengan menerapkan model pembelajaran langsung pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII.
5. Mengetahui karakter anti korupsi siswa pada kelas yang menerapkan model *Project Citizen* dan kelas yang menerapkan model pembelajaran langsung sebelum diberikan perlakuan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII.
6. Mengetahui karakter anti korupsi siswa pada kelas yang menerapkan model *Project Citizen* dan kelas yang menerapkan model

pembelajaran langsung setelah diberikan perlakuan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII.

7. Mengetahui apakah model *Project Citizen* lebih baik dari pada model pembelajaran langsung terhadap karakter anti korupsi siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII.
8. Mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar kognitif siswa dengan menerapkan model *Project Citizen* lebih baik dari pada dengan menerapkan model pembelajaran langsung pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII.
9. Mengetahui hasil observasi guru dan siswa dalam proses penerapan model *Project Citizen* terhadap hasil belajar kognitif dan karakter anti korupsi siswa pada kelas eksperimen mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bermanfaat untuk menguji teori pembelajaran menggunakan model *Project Citizen* yang kemudian akan dijadikan bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan model *Project Citizen* terhadap hasil belajar kognitif dan karakter anti korupsi siswa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti, siswa, dan guru, berikut ini penjelasan selengkapnya:

- a. Bagi peneliti, memperoleh wawasan secara mendalam mengenai pemahaman kognitif siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila sekaligus memahami konsep pembelajaran *Project Citizen* yang berbasis masalah untuk mengatasi masalah sikap koruptif ini pada peserta didik di SDN Bekasi Jaya VII.

- b. Bagi siswa, mendorong agar menjadi pribadi yang aktif dengan memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam masalah sosial. Selain itu membantu peserta didik untuk mempersonalisasikan dirinya sebagai warga negara yang menjunjung nilai luhur Pancasila.
- c. Bagi guru, kajian penelitian ini dapat dijadikan perspektif baru, khususnya pada pembelajaran Pendidikan Pancasila yang, sehingga dengan menerapkan model *Project Citizen* harapannya dapat membantu guru mengatasi masalah rendahnya karakter anti korupsi siswa di SDN Bekasi Jaya VII.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SDN Bekasi Jaya VII dengan siswa fase C kelas 5 sebagai populasi dan sampel. Sebagaimana judul yang ditetapkan, maka peneliti menggunakan dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel X penerapan model *Project Citizen*, variabel Y karakter anti korupsi siswa. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka Batasan penelitian ini terfokus pada;

1. Penerapan model *Project Citizen*
2. Pembahasan materi fase C kelas 5 mata pelajaran Pendidikan Pancasila
3. Dilaksanakan kepada siswa fase C kelas 5 di SDN Bekasi Jaya VII
4. Peneliti hanya mencari pengaruh dari penerapan model *Project Citizen* terhadap hasil belajar kognitif dan karakter anti korupsi siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila

F. Kerangka Berpikir

Membiasakan diri untuk menjalani kehidupan sesuai nilai-nilai Pancasila merupakan langkah terdekat seseorang untuk menjaga karakter kepribadian bangsa agar senantiasa kokoh dan memperkuat persatuan dan kesatuan (Adha & Susanto, 2020).

Karakter adalah sifat, tabiat, moralitas atau kepribadian seseorang, yang terbentuk sebagai hasil internalisasi berbagai kebajikan, diyakini dan digunakan sebagai landasan cara pandang, berpikir, berperilaku dan

bertindak (Salahudin & Alkrienciehie, 2013). Karakter manusia itu sangat kompleks, sifat yang tidak pernah puas dalam dirinya berpotensi menimbulkan ambisi keserakahan atas kedudukan hingga kekuasaan sehingga berdampak pada perbuatan tak bernilai seperti korupsi (Sacipto, 2022).

Korupsi mengabaikan nilai kejujuran, tenggang rasa, dan keadilan yang semestinya nilai-nilai itu dijunjung sebagai hak seseorang dalam bermasyarakat. Selain itu korupsi jelas sekali menghancurkan sendi-sendi ekonomi, dana yang disiapkan untuk membangun fasilitas pemberdayaan warga negara termasuk sekolah justru pada kenyataannya tidak berjalan pada rel yang legal (Solissa, 2021). Perlu adanya keseriusan dalam menyelesaikan persoalan korupsi di negara ini, salah satunya dengan formula khusus melalui strategi preventif untuk memberikan efek rasa takut bagi yang ingin melakukannya, yaitu melalui pendidikan, pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai upaya menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan diharapkan mampu membentuk karakter, watak perilaku (Prasetyo & dkk, 2021).

Peran aktif peserta didik dibutuhkan untuk membantu memerangi rantai sikap koruptif yang terjadi di sekitarnya, karena itu mereka perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup mengenai apa itu korupsi, langkah pemberantasannya, hingga nilai-nilai anti korupsi yang senantiasa dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari (Salahudin, 2018).

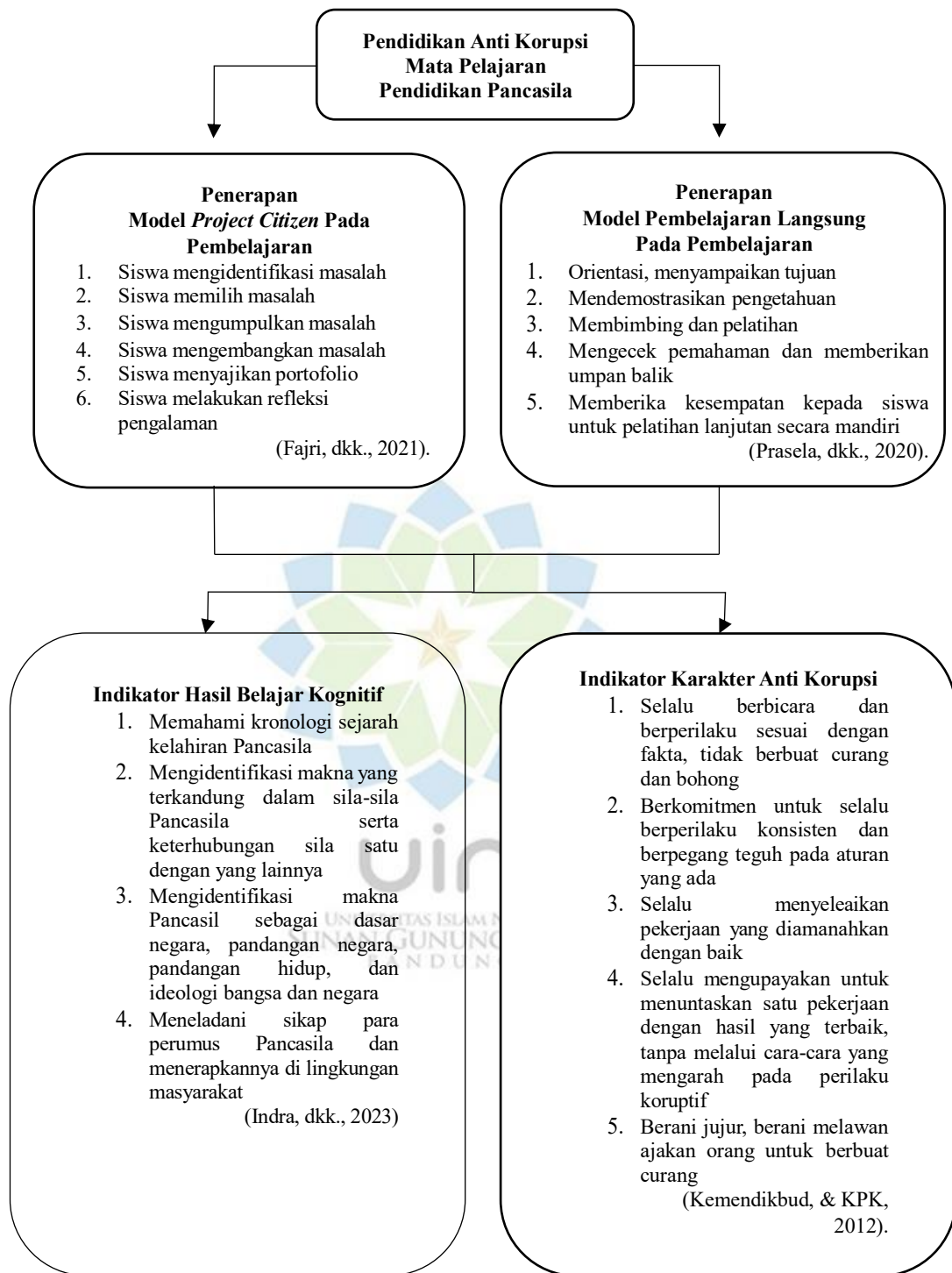
Pendidikan anti korupsi yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan 9 nilai yang perlu dimiliki masyarakat, khususnya peserta didik mulai dari jenjang dasar hingga tinggi, yaitu: jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli (Kemendikbud & KPK, 2012), yang kesemuanya itu tidak terlepas dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Dengan kata lain demi terwujudnya karakter kriteria Pancasila yang anti korupsi, kelima sila di dalamnya harus diletakkan dalam satu tarikan napas, tidak terpisah-pisah (Solissa, 2021).

Pelaksanaan pendidikan berbantuan model pembelajaran *Project Citizen* memiliki kegiatan belajar yang bertahap (Humaira & dkk, 2021), meliputi mengidentifikasi masalah, memilih masalah, mengumpulkan masalah, mengembangkan masalah, menyajikan portofolio, dan melakukan refleksi pengalaman belajar (Fajri, dkk., 2021).

Misi utama model *Project Citizen* adalah memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar secara empirik, mengetahui langsung masalah yang terjadi, selain itu membawa peserta didik sedari dini untuk mampu menganalisis kebijakan publik dalam konteks demokratis, serta mendorong peserta didik sebagai warga negara muda untuk berani mencoba menyuarkan masukannya terhadap kebijakan publik di lingkungannya yaitu sekolah atau rumah. Hal ini tentu membangun keterampilan kreatif, cerdas, kritis, nasionalis, serta partisipatif peserta didik (Ahmadin & dkk, 2023).

Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan penelitian diperlukan kerangka berpikir, maka kerangka berpikir ini adalah:





Gambar 1 1 Kerangka Berpikir

G. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hipotesis penelitian hasil belajar kognitif
 - a. H_0 : Hasil belajar kognitif siswa yang menggunakan model project citizen sama dengan yang menerapkan model pembelajaran langsung.
 H_a : Hasil belajar kognitif siswa yang menggunakan model project citizen lebih baik dari pada dengan yang menggunakan model pembelajaran langsung.menggunakan model pembelajaran langsung.
 - b. H_0 : Rata-rata peningkatan hasil belajar kognitif siswa setelah menggunakan model project citizen sama dengan yang menggunakan model pembelajaran langsung.
 H_a : Rata-rata peningkatan hasil belajar kognitif siswa setelah menggunakan model project citizen lebih baik daripada dengan yang menggunakan model pembelajaran langsung.
2. Hipotesis penelitian karakter anti korupsi siswa
 - a. H_0 : Karakter anti korupsi siswa yang menggunakan model project citizen sama dengan yang menggunakan model pembelajaran langsung.
 H_a : Karakter anti korupsi siswa yang menggunakan model project citizen lebih baik daripada dengan yang menggunakan model pembelajaran langsung.
 - b. H_0 : Rata-rata peningkatan karakter anti korupsi siswa setelah manggunakan model project citizen sama dengan yang menggunakan model pembelajaran langsung.
 H_a : Rata-rata peningkatan karakter anti korupsi siswa setelah menggunakan model project citizen lebih baik daripada dengan yang menggunakan model pembelajaran langsung

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penerapan model pembelajaran *Project Citizen* di dalam kelas menunjukkan bahwa model pembelajaran *Project Citizen* dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap anti korupsi peserta didik (Rube'i, & Rohani, 2020). Fokus model *Project Citizen* adalah pengembangan pengetahuan kewarganegaraan dan karakter kewarganegaraan yang bermuara pada berkembangnya kemampuan mengambil keputusan, wawasan, bernalar, dan bertanggung jawab (Ahmadin, dkk, 2023).

Implementasi model pembelajaran *Project Citizen* menunjukkan bahwa pola dan strategi pembelajaran di kelas bukan hanya memposisikan siswa duduk manis mendengarkan ceramah guru, melainkan membutuhkan keterlibatan siswa untuk aktif dan andil dalam setiap langkah pembelajarannya (Ulfah, 2017). Ini sesuai dengan misi utama model *Project Citizen*, yakni mendidik siswa agar mampu menganalisis kebijakan publik, serta mendorong siswa agar menjadi warga negara muda yang berani memberikan masukan terhadap kebijakan publik (Ahmadin, dkk., 2023) sekaligus memberdayakan siswa untuk menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan dengan demokratis melalui portofolio yang intensif mengenai masalah kebijakan publik di tempat mereka berinteraksi (Fajri, dkk., 2021).

Model *Project Citizen* merupakan desain lain dari model *problem based learning*, ini berarti pada prosesnya terdapat unsur-unsur yang mendorong siswa untuk aktif berpikir tingkat tinggi memecahkan masalah (Ulfah, 2017). Hasil penelitian Trisnawati dan Sundari (2020) menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis masalah efektif dilakukan untuk meningkatkan karakter anti korupsi siswa, dibuktikan dengan sikap peserta didik yang bertanggung jawab dan disiplin terhadap tugas yang diberikan secara berkelompok.

Rangkaian proses pembelajaran yang dilakukan dalam model *Project Citizen*, meliputi mengidentifikasi masalah, memilih masalah, mengumpulkan informasi, mengembangkan portofolio, menyajikan

portofolio, dan melakukan refleksi pengalaman belajar siswa selama merumuskan ide dan gagasan (Fajri, dkk., 2021). Melalui model ini semua aspek yang diharapkan dapat tercapai mulai dari aspek kognitif, afektif, hingga psikomotor (Rube'i, & Rohani, 2020). Karena itu model *Project Citizen* tidak semata-mata hanya mengatasi kebosanan belajar siswa dengan model konvensional, tetapi juga berperan mengembangkan kemampuan berpikir (Ulfah, 2017) sekaligus *civic disposition* atau karakter kewarganegaraan siswa (Ahmadin, dkk., 2023).

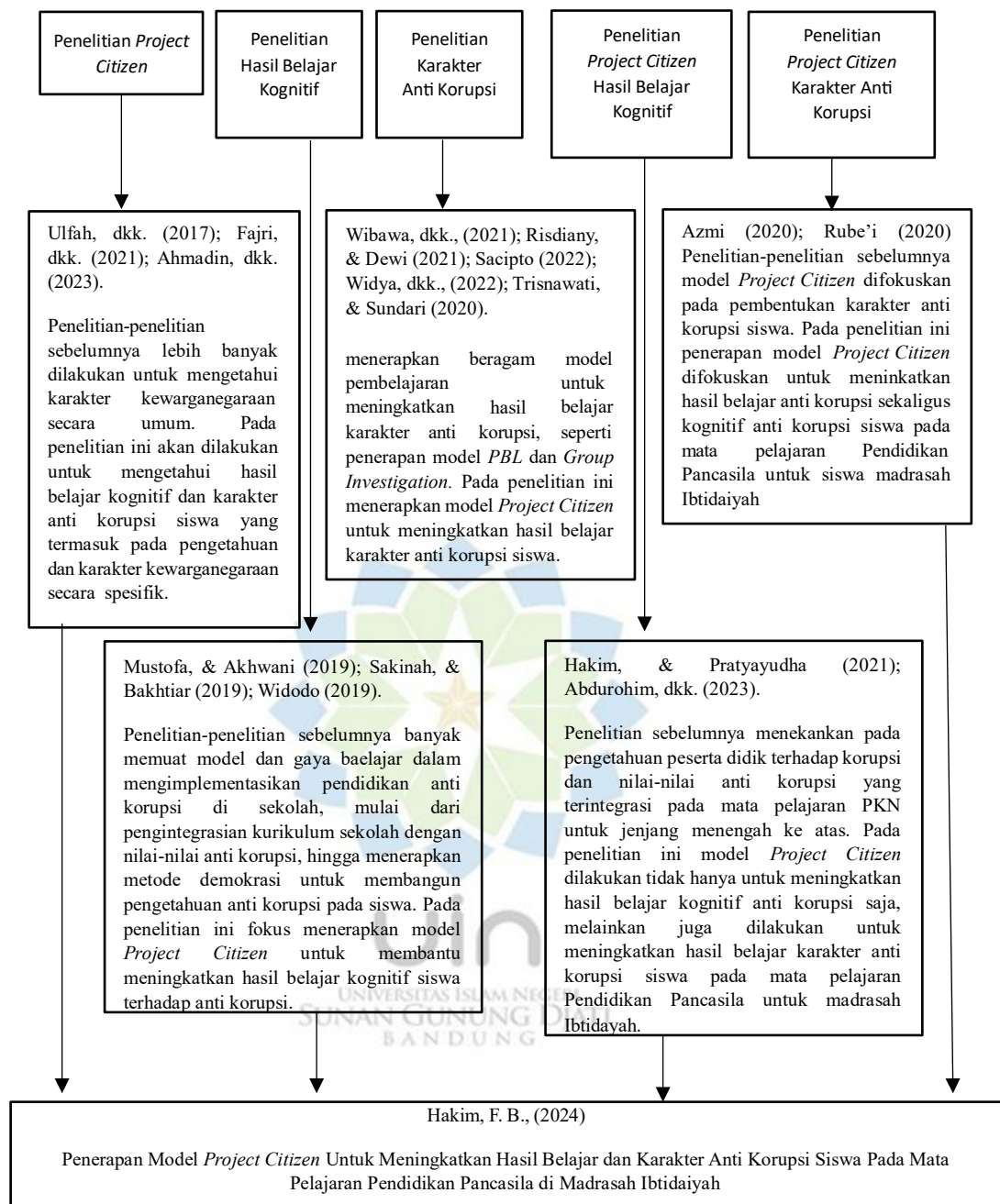
Karakter anti korupsi yang diperoleh melalui penanaman nilai-nilai Anti korupsi, seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil, pada kenyataan di lapangan berdasarkan hasil penelitian Rube'i dan Rohani (2020) menunjukkan bahwa subjek penelitian menganggap lumrahnya perilaku menyontek, menjiplak, dan menggelapkan uang dari orangtua, ini dapat terjadi karena konformitas dari lingkungan sekitar yang juga melakukan hal yang sama. Upaya dilakukannya penanaman anti korupsi sejak dini melalui pendidikan tentu akan menjadi solusi yang efektif dalam meminimalkan tindak pidana korupsi, lantaran tujuan jelas yang hendak dicapai oleh pembibitan nilai anti korupsi ini tidak lain untuk membangun kesadaran warga negara terhadap bahaya dan akibat dari korupsi (Hakim, & Pradityayudha, 2021).

Hasil penelitian Rube'i dan Rohani (2020) menjelaskan bahwa tujuan yang dimiliki model pembelajaran *Project Citizen* sesuai dengan misi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu mengembangkan sisi pengetahuan, watak, juga keterampilan kewarganegaraan peserta didik sebagai upaya membentuk *good and smart citizenship*. Selain itu pembelajaran menggunakan model *Project Citizen* membantu peserta didik untuk lebih mudah peduli pada korupsi ketika melihat kenyataan-kenyataan sekitar (Rube'i, & Rohani, 2020). Ini lantaran model *Project Citizen* menitikberatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran secara keseluruhan, baik kognitif, afektif, serta psikomotor (Hakim, & Pratyayudha, 2021).

Menurut Mustofa & Akhwani (2019) salah satu strategi yang tepat untuk membantu memberikan pemahaman terkait anti korupsi adalah dengan pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi pada mata pelajaran di sekolah. Metode yang cocok diaplikasikan pada pendidikan anti korupsi untuk meningkatkan kompetensi dasar siswa meliputi, metode demokrasi, pencarian bersama, metode keteladanan, dan metode *live in* (Sakinah, & Bakhtiar, 2019). Penelitian Widodo (2019) menambahkan bahwa pada pendidikan anti korupsi yang diintegrasikan pada mata pelajaran di sekolah, guru dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, seperti visual, audiotori, dan kinestetik untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan siswa terhadap nilai-nilai anti korupsi.

Penelitian-penelitian lain mengenai ketercapaian karakter anti korupsi melalui pendidikan anti korupsi juga dilakukan oleh Trisnawati & Sundari (2020) dengan penerapan model *PBL* dan *Group Investigation*, pendekatan *Student Central Learning* (Wibawa, dkk., 2021), penguatan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian oleh Risdiany & Dewi (2021) dan (Sacipto, 2022), model *Creative Problem Solving* (Widya, dkk., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas, model pembelajaran *Project Citizen* mampu meningkatkan ranah afektif pada siswa, dengan begitu penerapan model *Project Citizen* untuk meningkatkan karakter anti korupsi siswa di jenjang pendidikan sekolah dasar menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Model *Project Citizen* yang mendukung keterlibatan siswa untuk aktif mencari dan memecahkan masalah secara langsung memberikan pengaruh dalam meningkatkan karakter anti korupsi siswa. Gambar berikut menunjukkan kebaruan penelitian ini dan posisinya pada penelitian yang relevan.



Gambar 1 2 Posisi Penelitian Ini Di antara Penelitian Yang Relevan